



Judul : Kementan gandeng Kejagung awasi anggaran, DPR: Langkah yang tepat berantas penyelewengan
Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kementan Gandeng Kejagung Awasi Anggaran DPR: Langkah Yang Tepat Berantas Penyelewengan

Senayan menyambut baik inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mendukung program swasembada pangan.

DIKETAHUI, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Senin (16/12/2024). Dua lembaga negara ini ingin membersihkan sektor pertanian dari segala bentuk penyelewengan yang bisa menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka percepatan swasembada pangan.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, langkah Kementan menggandeng aparat penegak hukum merupakan terobosan dalam mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di sektor pangan. Sebab, pangan menempati posisi penting untuk menjamin pencapaian swasembada pangan.

"Sektor pangan ini banyak hal, mulai dari pupuk, benih, alsintan dan karena anggarannya memang cukup besar. Ketika Kementan menggandeng Kejaksaan Agung, saya kira langkah tepat," kata Rudianto Lallo kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (16/12/2024).

Untuk itu, dia berharap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan sungguh-sungguh dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam ini.

Kejaksaan dapat berperan aktif meminimalisir potensi penyimpangan, pelanggaran, dan tindak pidana korupsi sehingga muaranya nanti berujung pada kemaslahatan bangsa.

"Penegakan hukum di bidang sumber daya alam sebagai mana amanat Asta Cita Presiden Prabowo itu meminimalisir praktik penyimpangan di kementerian. Kalau itu terjadi maka muaranya adalah kesejahteraan rakyat, karena pasti muaranya adalah swasembada pangan," jelasnya.

Dia yakin, kolaborasi Kementan-Kejagung ini mencegah persoalan yang sering dihadapi petani seperti kelangkaan pupuk, aksi penimbunan bahan pangan, dan mafia impor. Di sinilah pentingnya institusi penegakan hukum hadir.

"Apalagi Pak Presiden selalu mengatakan bahwa kejahatan sumber daya alam, kejahatan narkoba, kejahatan judi online, itu semua adalah musuh negara. Karena dia musuh negara, ya institusi penegakan hukum harus hadir di situ, mengambil langkah penegakan hukum," tambahnya.

Sementara, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat swasembada pangan, khususnya padi dan jagung. Pemerintah harus semakin memperketat pengawasan karena meningkatnya anggaran untuk sektor pangan.

"Kami berkoordinasi dengan Jaksa Agung terkait pengawasan sarana produksi. Anggaran pupuk senilai Rp 54 triliun dan

bantuan alat pertanian Rp 10-15 triliun ini harus diawasi hingga ke kelompok tani," ujarnya.

Amran mengatakan, ada laporan pungutan liar dalam distribusi alsintan (alat mesin pertanian). Laporan itu didapatnya langsung melalui nomor pribadi yang khusus digunakan untuk pengaduan dari masyarakat.

"Ada seratus lebih laporan yang masuk, bantuan alsintan yang seharusnya bebas biaya malah diminta bayaran, hingga Rp 50 juta per unit. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena melanggar arahan Presiden," ungkapnya.

Tak hanya itu, Amran mengungkapkan adanya temuan pupuk palsu yang berdampak kepada 400 ribu orang dan merugikan petani hingga Rp 2,3 triliun. Pihaknya pun telah melaporkan empat perusahaan ke penegak hukum atas pelanggaran tersebut.

"Pupuk ini darah bagi petani kita. Tanpa pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Kami mendukung langkah tegas Kejagung untuk menindak oknum-oknum yang telah merugikan petani seperti ini," ujarnya.

Sementara ST Burhanuddin menegaskan komitmennya mendukung Kementan dalam memberantas penyelewengan di sektor pangan.

"Kami sudah bicarakan beberapa hal dalam rangka melakukan pengawasan Swasembada Pangan. Kami sudah dapat laporannya dari Pak Menteri. Sebagai tindak lanjut, kami akan kumpulkan faktanya terlebih dahulu. Tapi saya pastikan, kami tidak akan pandang bulu ke siapa pun," tegasnya. ■ KAL

Kampung Tanggap Bencana BAZNAS Terbukti Beri Manfaat Ke Masyarakat

ANGGOTA Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

Fikri menilai, BAZNAS telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai tahap penanganan bencana. Mulai dari tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, hingga upaya mitigasi risiko melalui program seperti Kampung Tanggap Bencana dan Masyarakat Bangkit Sejahtera.

"Saya mengapresiasi BAZNAS yang sudah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan membantu pemerintah," ujar Fikri dalam keterangan persnya, Sabtu (14/12/2024).

Dia melihat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat, terutama dengan partisipasi aktif lembaga ini dalam kesiapsiagaan bencana.

"BAZNAS semakin menunjukkan peran nyata yang diinginkan masyarakat, khususnya umat Muslim, dengan membentuk relawan-relawan tanggap bencana," sebutnya.

Menurut Fikri, BAZNAS telah memberikan kontribusi besar, termasuk menyediakan layanan kesehatan bagi korban bencana melalui Rumah Sehat BAZNAS (RSB).

"Dalam bencana banjir Sukabumi, tim RSB memberikan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir," ungkapnya.

Saat ini, BAZNAS memiliki relawan tanggap bencana di 360 kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi, serta tenaga medis dan non-medis dari 22 kabupaten dan 11 provinsi. Sementara, RSB telah menyediakan 22 titik layanan di 16 provinsi untuk melayani mustahik secara gratis.

Fikri juga menilai, sinergi BAZNAS dengan lembaga penanggulangan bencana seperti BNPB dan BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat membantu dalam penanganan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir bandang.

"BAZNAS membuktikan bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi masyarakat," tandasnya.

Pimpinan BAZNAS Bidang Koordinasi Nasional KH Achmad Sudrajat menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam rangka menanggulangi bencana di Indonesia.

"Dengan kolaborasi dan sinergi yang erat, maka dapat lebih mudah untuk membantu pemerintah dalam penanganan bencana nasional," ujarnya. ■ OSP